

JABM

Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Manajemen

ISSN:0854-4190

Pengaruh Manajemen Pengetahuan Terhadap Pegawai Kinerja Karyawan Non PNS yang di Mediasi Pembelajaran Organisasi Universitas Brawijaya

(Studi Pada Fakultas Terakreditasi Internasional). *Arien Hadhi Wibowo*

Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan Perpustakaan Kota Malang. *Didik Priyo dan Triana Murtiningtyas*

Dampak Pengangkatan Kembali Sri Mulyani Indrawati (SMI) Menjadi Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Terhadap Bursa Efek Indonesia (*Event Study* Pada Sektor Perbankan dan *Real Estate*). *Yuli Agustina*

Penyusunan Anggaran Penjualan Keramik (*Ceramic Tiles*) pada Toko Aira Mandiri Group Kota Langsa menggunakan Metode Trend Moment. *Muhammad Fuad dan Dian Novita*

Pengaruh *Human, Organization* dan *Technology (Hot)* Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum. *Siti Amerieska*

JABM

VOLUME 23

NOMOR 2

Oktober 2016

DAFTAR ISI

Volume 2

No. 2

Oktober 2016

- Pengaruh Manajemen Pengetahuan Terhadap Pegawai Kinerja Karyawan Non PNS yang di Mediasi Pembelajaran Organisasi Universitas Brawijaya (Studi Pada Fakultas Terakreditasi Internasional) 63-77
Arien Hadhi Wibowo
- Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan Perpustakaan Kota Malang 78-89
Didik Priyo dan Triana Murtiningtyas
- Dampak Pengangkatan Kembali Sri Mulyani Indrawati (SMI) Menjadi Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Terhadap Bursa Efek Indonesia (*Event Study* Pada Sektor Perbankan dan *Real Estate*) 90-102
Yuli Agustina
- Penyusunan Anggaran Penjualan Keramik (*Ceramic Tiles*) pada Toko Aira Mandiri Group Kota Langsa menggunakan Metode Trend Moment 103-121
Muhammad Fuad dan Dian Novita
- Pengaruh *Human, Organization* dan *Technology* (Hot) Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum 122-144
Siti Amerieska

Pengaruh *Human, Organization* dan *Technology* (Hot) Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum

Siti Amerieska

Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

Email: Sarieka_09@yahoo.com

Abstract:

This study pupose to examine the human (human resource capacity), organization (application of accounting standards and internal control systems) and technology towads the quality of financial reporting information in Badan Layanan Umum (BLU). The population of this study are all users who carry out financial reporting. Data used in this study are primary data, which obtained from distributing questionnaires. The results of this study that simultaneously signify the human variables, technology significantly influence the quality of financial reporting information Badan Layanan Umum (BLU). While variable implementation of standards accounting does not have a significant effect, but for variable application of the system of internal control has significant effect.

Keywords: *Organization, Human, Technology*

PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum yang disingkat BLU adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan proses pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja, maka Satuan Kerja (Satuan kerja) berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, sehingga berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat dan dapat meningkatkan akuntabilitas publik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Sebuah laporan pertanggungjawaban yang andal tentunya juga terbentuk dari proses yang berkualitas dimana tim penyusun laporan keuangan tersebut memiliki kemampuan kompetensi dan didukung dengan teknologi informasi melalui sistem informasi akuntansi, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula (Swardjono, 2005). Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pada dasarnya sebagai langkah konkrit pemerintah untuk membenahi pelayanan publik kepada masyarakat yang selama ini cenderung dianggap lamban dan tidak efisien.

Dengan tata kelola BLU yang mengadopsi model manajemen pada sektor swasta, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan publik sehingga mampu menjawab harapan masyarakat atas layanan publik yang responsif dan terjangkau.

Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (*agencification*) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan Pola PK BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset. Kepada satuan kerja BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Sebagai penyeimbang, satuan kerja BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. BLU dapat berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya dengan menandatangani kontrak kinerja (*a contractual performance agreement*), dimana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan satuan kerja BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

Berkembangnya pengelolaan keuangan BLU di Indonesia seiring dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas. Media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar adalah Laporan Keuangan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(BLU), sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan untuk satuan kerja Badan Layanan Umum diwajibkan menyampaikan tambahan laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan laporan pertanggung jawaban BLU menggunakan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia dan apabila belum ada standar akuntansi yang mengaturnya, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan dari kekayaan pemerintah pusat, sehingga laporan keuangan yang disajikan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK menjadi lampiran bagi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan untuk tujuan pengkonsolidasian (pengintegrasian) laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga perlu dilakukan mapping ke dalam perkiraan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Badan Layanan Umum (BLU)

Pengertian Badan Layanan Umum sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, adalah sebagai berikut: "Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa peyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.

Menurut PMK Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, menyatakan bahwa sistem akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU. Satuan kerja BLU juga diwajibkan untuk membangun dan menggunakan sistem akuntansi BLU yang terdiri dari:

Sistem akuntansi keuangan

Sistem akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional (LRA/LO), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia /standar akuntansi industri spesifik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

Sistem akuntansi aset tetap

Sistem akuntansi aset tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan milik BLU tetapi berada dalam pengelolaan BLU. Pengembangan sistem akuntansi aset tetap diserahkan sepenuhnya kepada BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Sistem akuntansi biaya

BLU mengembangkan sistem akuntansi biaya yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan per unit layanan, dan evaluasi varian. Sistem akuntansi biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya sebagaimana bunyi PMK Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU

menyusun dan menyajikan dua laporan yaitu: (1) Laporan Keuangan. Laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional (LRA/LO), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (2) Laporan Kinerja. Laporan keuangan pokok disertai dengan laporan kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Sumber Daya Manusia

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, pada satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Mardiasmo, 2003).

Menurut pernyataan dari Kusufi (2014) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Teknologi Informasi

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan metode pengolahan yang lain.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke

dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian atas keakurasian data sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN, yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.*, 2000): (1) Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat (2) Keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar (3) Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah (4) Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu (5) Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan (6) Pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak dan (7) Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU pada Bab III mengenai sistem akuntansi yang intinya BLU diwajibkan mengembangkan sistem akuntansi BLU yang terdiri dari: (1) Sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi (2) Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap dan (3) Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan

manajerial. Artinya pemerintah mengajurkan agar para satuan kerja BLU dalam proses pengelolaan keuangan dan pelaporannya menggunakan teknologi informasi

Wilkinson *et al.*, (2000) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Informasi Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang disusun oleh manajemen sebagai media penyampaian informasi mengenai laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan BLU merupakan salah satu media informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Nilai lebih suatu lembaga/instansi ditunjuk menjadi BLU salah satu hal dapat ditinjau dari isi laporan keuangan adalah BLU harus mengikuti ketentuan untuk laporan keuangan organisasi nirlaba dan menyanggupi untuk laporan keuangan tersebut diaudit oleh *auditor independence*. Dengan kesanggupan tersebut tentu saja diharapkan BLU dapat mencapai tata kelola keuangan yang baik (*Akuntabilitas*) dan pelaporan yang transparan (*transparency*). Dengan demikian, SAP dan SAK merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Politeknik Negeri Malang (Polinema) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang dimulai sejak penetapannya menjadi Badan Layanan Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.58/KMK.05/2012, tanggal 24 Februari 2012, sehingga setiap periode Polinema diwajibkan menyusun dan menyampaikan 2 (dua) laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan Politeknik Negeri Malang dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) setiap tahun di audit oleh Auditor Independen yaitu kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), sedangkan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di audit oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)

Kualitas Laporan Keuangan Polinema tercermin dari opini auditor independen dari hasil audit laporan keuangan tahunan. Hasil opini audit oleh KAP terhadap Laporan keuangan Polinema tahun 2012 adalah Wajar Dengan Pengecualian dan tahun 2013 sampai dengan 2015 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil opini auditor independen merupakan cerminan atas kualitas laporan keuangan yang telah disusun oleh Polinemas sebagai laporan pertanggungjawaban instansi kepada publik. Hasil opini audit KAP atas laporan keuangan Polinema selama 4 (empat) tahun berturut-turut perlu diteliti faktor apakah yang menyebabkan peningkatan dari kualitas laporan keuangan tersebut.

Capaian opini auditor tersebut menunjukkan bahwa pola pengelolaan keuangan pada Polinema telah dilakukan secara optimal dengan penuh tanggungjawab oleh seluruh sumberdaya yang ada, meskipun begitu masih perlu dilakukan kajian dan perbaikan dalam pengelolaan BLU, apalagi jika dikaitkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima dari Negara dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup besar sehingga dalam praktek pengelolanya menjadi lebih kompleks dan rumit.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan

Suatu informasi yang bernilai (keterandalan), memiliki elemen pokok, yakni SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan *profesional* dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Mardiasmo, 2003).

Menurut Ariesta (2013) menyatakan bahwa penerapan SAP, kualitas SDM, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan pemanfaat TI berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan K/L Satker mitra KPPN Medan II. Senada dengan penelitian di atas Indriasari (2008) juga menemukan bahwa kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bertolak belakang dari penelitian di atas menurut Sukmaningrum dan Harto (2011) hasil penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan. Hal serupa juga ditemukan dari hasil penelitian Arisandi, Nasir dan Rusli (2012) mereka menunjukkan bahwa variabel SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemda.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dibuat hipotesis :

H₁: Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Pengaruh Teknologi Informasi (TI) Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah Teknologi Informasi, karena mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi. Penerapan TI dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mengadopsi perkembangan tata kelola keuangan pemerintah serta tuntutan untuk berkompetisi dengan organisasi lain bahkan diharapkan mampu memenangkan kompetisi tersebut. Disinilah seorang pemimpin dituntut untuk mampu menyelaraskan tujuan organisasi dengan strategi TI yang diterapkan.

Paradigma pemanfaatan TI yang menempatkan TI hanya sebagai peralatan dalam menunjang kegiatan organisasi seperti peralatan kantor lainnya, harus dirubah seiring dengan persaingan dan fluktuasi perubahan pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga penerapan TI bukan hanya sebagai *supporting tools* saja, tetapi menjadi *strategic tools* yang fungsi dan perannya lebih komprehensif dan lebih luas terkait pada visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi dituntut untuk mengaplikasikan teknologi bukan hanya untuk menjaga eksistensi bisnisnya melainkan juga untuk menciptakan peluang dalam persaingan. Pemahaman mengenai peran pengembangan teknologi dan sistem informasi diperlukan untuk mengelola teknologi dan sistem informasi dalam organisasi itu sendiri. Penerapan TI dalam organisasi harus mampu mendukung kegiatan operasional organisasi pada level strategis, teknis maupun operasional organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

Pengembangan TI di Polinema salah satunya berupa sistem informasi manajemen keuangan yang dimulai sejak penetapannya menjadi Badan Layanan Umum, namun belum dapat digunakan karena masih dalam proses pembangunan. Sehingga dalam operasional pengelolaan BLU polinema menggunakan sistem informasi standar akuntansi keuangan Badan Layanan Umum (SIM SAK BLU) yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sistem tersebut dapat mengakomodir kebutuhan para satuan kerja BLU khususnya Polinema dalam melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLU serta mampu mengintegrasikan antara laporan keuangan berdasarkan SAK dan juga SAP. Sehingga SIM SAKBLU tersebut relevan untuk digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan BLU.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan SIM SAK BLU sampai dengan saat ini adalah bahwa SIM SAK BLU dikembangkan untuk seluruh satker BLU Pendidikan dimana tingkat kompleksitas dan kebutuhan informasi antara satu satker dengan satker yang lain berbeda, khususnya Polinema, sehingga kebutuhan manajemen akan informasi tidak serta merta dapat diperoleh dari SIM SAKBLU, sehingga penyusun laporan masih menggunakan cara manual, sebagai contoh adalah Laporan Serapan Per Unit Kerja Politeknik Negeri Malang.

Kendala tersebut mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di Polinema belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi tersebut juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Aryani (2013), Arisandi (2012) dan Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Zetra (2009) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis 2: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Pengaruh Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan

Organisasi yang dijabarkan dalam penelitian meliputi penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan sistem pengendalian internal (SPI) yang diterapkan di Politeknik Negeri Malang. Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang dilakukan BLU Polinema, sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan untuk satuan kerja Badan Layanan Umum diwajibkan menyampaikan tambahan laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan laporan pertanggung jawaban BLU menggunakan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia dan apabila belum ada standar akuntansi yang mengaturnya, dapat

menerapkan standar akuntansi industri yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan dari kekayaan pemerintah pusat, sehingga laporan keuangan yang disajikan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK menjadi lampiran bagi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Sedangkan untuk tujuan pengkonsolidasian (pengintegrasian) laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga perlu dilakukan mapping ke dalam perkiraan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu peneliti ingin menguji penerapan sistem akuntansi keuangan dengan nilai informasi laporan keuangan dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis 3: Penerapan Standar Akuntansi Badan Layanan Umum Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Pelayanan dalam bentuk BLU bertujuan mencapai pelayanan yang baik dengan pengelolaan mandiri untuk memanfaatkan aset yang dimiliki. Selain itu dalam bentuk BLU, harapannya dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisien dan efektivitas. Dengan pengelolaan keuangan dalam pola BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa. Seiring dengan itu, perlu sistem kendali ketat dalam perencanaan, penganggaran keuangan, pengelolaan aset. Implementasi sistem kendali yang dapat dilakukan oleh lembaga/ institusi adalah dengan menjalankan fungsi Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Namun demikian, walaupun disetiap instansi pemerintah sudah menjalankan fungsi Sistem Pengendalian Internal (SPI) masih belum mampu mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang baik. Kecenderungan tidak dilaksanakannya pengendalian internal dengan baik memunculkan penyimpangan anggaran, pencatatan aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan berakibat laporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah) yang kurang akuntabel. Fenomena di atas menunjukkan adanya kelemahan dalam menjaga dan melindungi aset negara. Kelemahan SPI lainnya adalah perencanaan kegiatan yang tidak memadai dan entitas tidak memiliki SOP formal. Banyaknya LKPD yang memperoleh opini tidak waja dan memerlukan perbaikan pengendalian internal. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis 4: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana analisis yang akan dilakukan menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis. Dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai pertimbangan bahwa informasi yang diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Adapun criteria responden yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Pegawai di seluruh lingkungan Polinema yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan pada unit (2) Pegawai yang memahami tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan dan (3) Pegawai yang memiliki masa kerja dan menjabat minimal dua tahun atau lebih pada fungsi akuntansi dan pengelolaan keuangan.

Berikut indikator dalam variabel pada penelitian pengaruh sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang).

Tabel 1. Macam Variabel dan Indikator

1	Sumber Daya Manusia (SDM)	X1	: Latar belakang pendidikan	Skala Likert 1 - 5 dengan 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 5 (Sangat Setuju)
		X2	: Uraian peran dan fungsi	
		X3	: Fungsi akuntansi	
		X4	: Pelatihan keahlian dalam tugas	
2	Teknologi Informasi (TI)	X5	: Software aplikasi	Skala Likert 1 - 5 dengan 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 5 (Sangat Setuju)
		X6	: Proses akuntansi secara komputerisasi	
		X7	: Software sesuai peraturan perundangan	
		X8	: Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi	
		X9	: Komputer, internet/jaringan dan aplikasi merupakan kebutuhan pokok dalam bekerja	
3	Organisasi (Penerapan Standar Akuntansi)	X10	: Kesesuaian penerapan SAK(Standar Akuntansi Keuangan)	Skala Likert 1 – 5 dengan 1 (Sangat Tidak Setuju)

(SAP)	X11	: Kesesuaian penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	sampai 5 (Sangat Setuju)
	X12	: Hasil Opini Auditor	
	X13	: Reiew BPK atas penerapan SAP	
4 Organisasi (Sistem Pengendalian Internal)	X13	: Lingkungan Pengendalian	Skala Likert 1 – 5 dengan 1 (Sangat Tidak Setuju)
	X14	: Penilaian Resiko	
	X15	: Aktivitas Pengendalian	sampai 5 (Sangat Setuju)
	X16	: Informasi dan Komunikasi	
5 Kualitas Laporan Keuangan	X17	: Pemantauan	
	X18	: Informasi yang ada dalam laporan keuangan sesuai dengan harapan dan kebutuhan	Skala Likert 1 – 5 dengan 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 5 (Sangat Setuju)
	X19	: Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu perencanaan keuangan pada periode berikutnya	
	X20	: Laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan	
	X21	: Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi persyaratan normatif	
	X22	: Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci	
	X23	: Informasi dalam laporan keuangan menggambarkan secara jujur	
	X24	: Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	

X25 :	dapat diuji Seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
-------	--

HASIL dan PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan di lingkungan Politeknik Negeri Malang yang terdiri dari para Bendahara, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Juru bayar/operator SIM keuangan, operator simak bmn dan persediaan di unit kerjadan penyusun laporan keuangan serta para anggota Badan Pengawas. Dari 125 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 109 dikembalikan dan semua kuesioner yang kembali mengisi jawabannya lengkap, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 109. Jumlah kuesioner yang disebar total berjumlah 125 lembar, sedang kuesioner yang tidak kembali berjumlah 16 lembar. Kuesioner yang kembali dan diisi lengkap berjumlah 109 lembar dengan tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 87 %. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 109 lembar.

Adapun rincian jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Deskriptif Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirimkan	125
Kuesioner yang tidak kembali	16
Kuesioner yang kembali dan diisi lengkap	109
Tingkat pengembalian kuesioner (<i>respon rate</i>)	87%

Sumber : Data primer diolah, 2015

Berikut disajikan deskripsi profil responden yaitu 137 orang pegawai di Polinema yang bekerja sebagai pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan yang meliputi karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, unit kerja, dan masa kerja:

Usia Responden

Berikut disajikan deskripsi responden penelitian berdasarkan usia:

Tabel 3. Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
20-30 Th	35	32.1
31-40 Th	25	22.9
41-50 Th	30	27.5
> 50 Th	19	17.5
Total	109	100

Sumber: Lampiran 1 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa pegawai dengan usia antara 20-30 tahun adalah responden mayoritas yaitu sebanyak 35 orang atau 32.1% dari total keseluruhan, sedangkan responden dengan usia di atas 50 tahun adalah responden dengan jumlah paling sedikit diantara usia responden yang lain yaitu sebanyak 22 orang (17.5%)

Jenis Kelamin Responden

Berikut disajikan deskripsi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	40	36.7
Wanita	69	63.3
Total	109	100

Sumber: Lampiran 1 (diolah)

Dilihat dari segi jenis kelamin, dapat diketahui bahwa pegawai wanita yaitu sebanyak 69 orang (63.3%) sedangkan pegawai pria yaitu sebanyak 40 orang (36.7%). Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai Polinema sebagai pengelola keuangan adalah pegawai wanita.

Pendidikan Responden

Berikut disajikan deskripsi responden penelitian berdasarkan pendidikan:

Tabel 5. Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SLTA	13	11.9
Diploma	57	62.4
S1	19	17.4
S2	20	8.3
Total	109	100

Sumber: Lampiran 1 (diolah)

Responden dengan pendidikan D3 adalah responden yang paling banyak menjadi pegawai sebagai pengelola keuangan di Polinema, yaitu sebanyak 68 orang (62.4%) dari total keseluruhan responden, sedangkan responden dengan pendidikan S2 adalah responden dengan jumlah paling sedikit yaitu sebanyak 9 orang (8.3%).

Unit Kerja

Berikut disajikan deskripsi responden penelitian berdasarkan unit kerja:

Tabel 6. Unit Kerja Responden

Unit Kerja	Frekuensi	Persentase
Bidang I sd IV	8	7.3
Badan Pengawas (Internal Audit)	12	11
BAAK	4	3.7
BAUK	40	36.7
UPT	8	7.3
Unit-lainnya	5	4.6
Jurusan Teknik Elektro	8	7.3
Jurusan Teknik Informatika	2	1.8
Jurusan Teknik Sipil	4	3.7
Jurusan Teknik Mesin	4	3.7
Jurusan Teknik Kimia	4	3.7
Jurusan Akuntansi	6	5.5
Jurusan Administrasi Niaga	4	3.7
Total	109	100

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa pegawai pada unit kerja Bagian Administrasi dan Keuangan (BAUK) adalah responden mayoritas yaitu sebanyak 40 orang atau 36.7% dari total keseluruhan, sedangkan responden dengan yang bekerja pada Jurusan Teknik Informatika) adalah responden dengan jumlah paling sedikit, yaitu sebanyak 2 orang (1.8%) dari total keseluruhan responden.

Masa Kerja

Berikut disajikan deskripsi responden penelitian berdasarkan masa kerja:

Tabel 7: Masa Kerja Responden

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
< 5 Th	25	37.2
5-10 Th	37	34.3
10-15 Th	25	13.1
16-20 Th	16	5.8
> 20 Th	13	9.5
Total	109	100

Sumber: data diolah

Dilihat dari segi masa kerja, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Polinema sebagai pengelola keuangan telah bekerja selama 5-10 tahun, yaitu sebanyak 47 orang pegawai (34.3%) dari total keseluruhan. Pegawai dengan masa kerja antara 16-20 tahun merupakan pegawai dengan jumlah paling sedikit diantara pegawai lainnya, yaitu sebanyak 8 orang (5.8%) dari total keseluruhan responden.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu kapasitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), penerapan sistem akuntansi pemerintahan (X3), sistem pengendalian intern (X4) dan variabel dependen yaitu kualitas informasi pelaporan keuangan BLU (Y). Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu (X1, X2, X3 dan X4) terhadap variabel dependen (Y). Berikut pada tabel 8 hasil dari pengujian regresi linear berganda menggunakan program SPSS 16.0 for windows:

Tabel 6. Hasil Analisis Perhitungan Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
I				
(constant)	-7.675	7.874	.329	-.837
X1	.300	.124	-.022	2.416
X2	-.018	.116	.204	-.158
X3	.342	.267	.515	1.351
X4	.657	.206		3.172

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = - 7.675 + 0,300X_1 - 0,018X_2 + 0,342X_3 + 0,657X_4$$

Keterangan:

Y = Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan

b₀= Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄= Koefisien Regresi

X₁ = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₃ = Penerapan Sitem Akuntansi Pemerintah

X₄ = Pengendalian Intern Akuntansi

e = Error

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	176.891	4	42.133	4.996	.000
Residual	141.745	25	2.743		
Total	298.437	29			

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai dari F hitung sebesar 4,996 lebih besar dari F tabel 2,76 diperoleh nilai F tabel dengan df₁= 4 dan df₂ = 30-5 = 25. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia (X₁), pemanfaatan teknologi informasi (X₂), penerapan standar akuntansi pemerintah (X₃) dan sistem pengendalian intern (X₄) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui dari tabel di bawah:

Tabel 9. Hasil Uji Statistik T

Variabel	T	Sig.	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	2,118	0,013	Signifikan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	-0,437	0,023	Signifikan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (X3)	1,231	0,732	Tidak Signifikan
Sistem Pengendalian Intern (X4)	4,561	0,002	Signifikan

Sumber: data diolah

Hasil pengujian H1 pada tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,013, dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari pada taraf signifikansi (α) = 0,05 sedangkan t hitung sebesar 2,118 lebih besar dari pada t tabel sebesar 1,708. Jadi kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan badan layanan umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rovieyantje (2011) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi, karena jika sumber daya manusia tidak memahami akuntansi, maka akan sulit sistem akuntansi diterapkan dengan baik. Sedangkan hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Indriasari dan Ertambang (2008), Arisandi dkk (2013) dan Mustafa dkk (2011) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis H2 pada tabel 9 di atas diketahui bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan badan layanan umum (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,023 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (α) = 0,05. Jadi pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan badan layanan umum. Koefisien negatif ini apabila nilai dari variabel independen X2 ditingkatkan sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan penurunan nilai pada variabel dependen Y.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisandi dkk (2008) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian Arisandi dkk (2008) sejalan dengan penelitian Mustafa dkk (2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang menyebabkan variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kurangnya dukungan kebijakan dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah. Perangkat lunak (*software*) dan keras (*hardware*) dalam pemanfaatan teknologi informasi para pegawai memerlukan waktu yang lama untuk mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan dan penyampaian informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis 3 pada tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan badan layanan umum (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,732 dimana nilai signifikansi ini lebih besar daripada taraf signifikansi (α) = 0,05. Jadi penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan badan layanan umum.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan. Tidak signifikannya variabel penerapan standar akuntansi badan layanan umum disebabkan dari standar akuntansi yang diterapkan kurang dipahami oleh pegawai dimana dalam penyusunan laporan keuangan BLU, menyusun berdasarkan dua standar yakni standar akuntansi pemerintah (SAP) dan standar akuntansi keuangan (SAK).

Hasil pengujian hipotesis H4 pada tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal (X4) berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan badan layanan umum (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,02 dimana nilai signifikansi ini lebih besar dari taraf signifikansi (α) = 0,05. Jadi sistem pengendalian intern

berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan badan layanan umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ariestaa (2013) dan Zuliarti (2012) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan terapai.

Pengendalian intern yang dilaksanakan pada BLU Polinema cukup memadai, sebagian besar sudah diimplementasikan dalam sistem dan prosedur akuntansi, otoritas pihak yang berwenang, formulir, dokumen dan catatan serta pemisahan tugas. Kegiatan pengendalian ini nantinya menjamin semua sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, dimana SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN dan SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), hal ini menunjukkan kondisi kapasitas sumber daya manusia dibidang akuntansi dan pelaporan sudah mendukung dari segi jumlah, kualifikasi serta keikutsertaan pegawai dalam pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi pemerintah khususnya BLU dan pengelola keuangan. (2) Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan hal ini dikarenakan dukungan kebijakan dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan BLU seperti pengelolaan data, dan pengelolaan informasi, sehingga dalam proses kerja sangat efektif, terutama ketepatan waktu pelaporan keuangan. (3) Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan SAP yang diterapkan sudah diterapkan sebelumnya pada saat sebelum status Polinema BLU. Sedangkan penerapan SAK dan SAP pada satu laporan keuangan BLU masih kurang diahami karena butuh penyesuaian. (4) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa

semakin baik pengendalian intern maka berdampak semakin baik pula sistem prosedur terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) Untuk penelitian selanjutnya dalam objek penelitian memperluas jangkauannya seperti badan layanan umum seluruh Jawa Timur agar sampel penelitian yang digunakan lebih banyak dan akurat dalam menentukan kriteria responden. (2) Memperbaiki kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini agar tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi. Selain itu pengumpulan data diharapkan tidak hanya berfokus pada kuesioner tetapi juga menggali informasi secara langsung dengan informan. (3) Pada setiap instansi diharapkan merekrut pegawai untuk posisi yang berkaitan dengan teknologi informasi sesuai dengan kompetensi sehingga tidak ada pemasalahan pada saat penggunaan sistem yang sudah terkomputerisasi. Selain itu pegawai perlu diikutsertakan dalam pelatihan SAP secara bertahap agar sistem akuntansi dapat diterapkan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Rian. 2014. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP 71 Tahun 2010)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
- Alfiana, Naela. 2014. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerinth Derah Dengan Komitemen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
- Ariesta, Fadila. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuanan Daerah*. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Arisandi, Wan Desi, Azir, Nasir dan Rusli. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Peanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Indriasari, Desi dan Ertambang. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Inf,ormasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Kusufi, Muhammad Syam dan Wijayanti Rita. 2014. *Anggaran Sebagai Objek Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mustafa, Sutrisno, Rosidi. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Kepatuhan Pelaporan Keuangan pada*

- SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*. Jurnal Universitas Haluleo, Kendari.
- Nurillah, As Asyifah. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Roviyantie, Devi. 2011. *Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi Universitas Siliwangi Bandung.
- Swardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan dan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga BPFE, Yogyakarta
- Zuiarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muria, Kudus.